



LAKIP
TAHUN 2022
BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BENGKULU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERITAHAN

**SASARAN 1. TERCIPTANYA KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA**

No	Uraian	Target Tahun 2022	CAPAIAN KINERJA			
			Tahun 2021		Tahun 2022	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	88 Perda dan Pergub	75 Perda dan Pergub	88%	88 Perda	100%
2.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	150 Perda dan Perkada	160 Perda dan Perkada	107%	346 Perda dan Perkada	231%
3.	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	550 SK Gub	550 SK Gub	100%	550 SK Gub 100%	100%

Sumber : Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu

Berdasarkan tabel diatas dapat di simpulkan sebagai berikut :

- 1) Indikator persentase rancangan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan di Provinsi Bengkulu (Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan untuk menjadi target pada Tahun 2022 sebanyak 88 perda/pergub dan realisasinya sebanyak 88 Perda)

Tabel.

Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
1.	2021	88 Perda	75 Perda	88%
2.	2022	88 Perda	88 Perda	100%

- 2) Indikator pembinaan dan pengawasan peraturan dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten /kota dapat terlaksana secara maksimal dikarenakan adanya sumber daya manusia yang handal dan terampil.

Tabel
Perkembangan Pembinaan dan Pengawasan Perda dan Perkada Kabupaten/Kota

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
1.	2021	150 Perda dan Perkada	160 Perda dan Perkada	107%
2.	2022	150 Perda dan Perkada	346 Perda dan Perkada	231%

REKOMENDASI DAN SARAN

Langkah langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatnya kualitas Produk Hukum Daerah Perda dan Perkada Kabupaten/Kota:

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang handal dan trampil.
2. Peningkatan sarana dan prasarana.
3. Bimbingan teknis dan sosialisasi bagi Pegawai Negeri Sipil.

SASARAN 2. TERCAPAINYA PENYELESAIAN PERKARA LITIGASI, PERMASALAHAN HUKUM NON LITIGASI DAN MENINGKATNYA PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, PEMAHAMAN, PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAM PROVINSI BENGKULU

NO	INDIKATOR KINERJA	TERGET TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA			
			Tahun 2021		Tahun 2022	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Persentase Penyelesaian Perkara Litigasi	12 Perkara	12 Perkara	100%	5 Perkara	42%
2.	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Non Litigasi	11 Perkara	11 Perkara	100%	11 Perkara	100%
3.	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM Provinsi dan Kabupaten Kota	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	100%

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator persentase penyelesaian perkara litigasi

Penyelesaian perkara litigasi adalah penyelesaian perkara yang ada di pengadilan Tata Usaha Negara. Perkara litigasi pada Tahun 2022 Realisasi sebanyak 4 perkara tapi target sebanyak 12 perkara, hal ini disebabkan karena hanya ada 4 perkara yang masuk ke Biro Hukum.

Tabel.
Capaian Kegiatan Litigasi

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
1.	2021	12 Perkara	12 Perkara	100%
2.	2022	12 Perkara	5 Perkara	42%

**CAPAIAN PENANGANAN PERKARA KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
TAHUN 2022**

NO	PERKARA	OBJEK GUGATAN	PENGUGAT	TERGUGAT	PROSES HUKUM	KETERANGAN
1.	6/6/2022/PTUN.BKL	SK KONI Pusat Nomor 20 Tahun. 2022 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Bengkulu masa bakti 2021-2025 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 28 Januari 2022	Dr.HC.H. Ahmad Hijazi, S.H., M.Si	Gubernur Bengkulu	Tingkat I (incraht)	Gugatan dicabut oleh permintaan Penggugat
2.	4/6/2022/PTUN.BKL	Keputusan Kepala Sekolah SMA N 1 Kepahiang Nomor : 2156/122.16.02/SM U	Ujang Syarifudin (P.1) dan Ir. H. Firdaus Djailani (P.2)	Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu	Kasasi (incraht)	Termohon Kasasi Menang
3.	25/6/2022/PTUN.BKL	Pengumuman Pemenang Pelelangan Pengadaan Alat Peraga Kujuruan/Praktek pada Disnakertrans Provinsi Bengkulu	CV. Gudang Karya	POKJA Pengadaan Alat Peraga Kejuruan UKPAJ (T.1) Kuasa Pengguna Anggaran Disnakertrans (T.2) dan PPTK Kegiatan Disnakertrans Provinsi Bengkulu (T.3)	Tingkat I (incraht)	Gugatan dicabut oleh Pemerintahan Penggugat
4.	29/6/2022/PTUN.BKL	SK Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/5.852/IV/B.V-DPU-TR/2022 tanggal 18 april 2022 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan SPAM Regional Kebema (OAK)	PT. Riski Utama Jaya Abadi	PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu		
5.	2/P/FP/2022/PTUN.BKL	Keputusan FIKTIF/PISITIF dari Termohon perihal Permohonan Nomor: 21/BMQ.BKL/XI/2019 tanggal 15 November 2019	PT. BMQ	Gubernur Bengkulu	Peninjauan Kembali II	Proses Mahkamah Agung

2. Indikator Penyelesaian Permasalahan Hukum Non Litigasi

Penyelesaian perkara litigasi mempunyai target pada tahun 2021 dan 2022 mempunyai target 11 Perkara dan 3 Laporan aksi HAM.

Adapun Hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan di Sub Bag Non Litigasi Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM sebagai berikut:

1. Penanganan Kasus Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM Kabupaten Kota Se- Provinsi Bengkulu.

NO	KASUS /SENGKETA	MATERI PEMBAHASAN	TAHAPAN PENANGANAN	TEMPAT /LOKASI	KETERANGAN
1.	PT.INJATAMA MINING	Tukar guling jalan Perusahaan batu bara dengan jalan Pemerintah Provinsi Bengkulu	Masih dalam proses	Desa Gunung Payung Bengkulu Utara	Telah dilakukan beberapa kali rapat koordinasi di tingkat provinsi, belum ada titik temu antara Pemerintah Provinsi dengan pihak PT Injatama
2.	SPAMKOBEMA Kota Bengkulu.	Terjadi penyerobotan Lahan terletak di desa Air Sebakul diserobot oleh masyarakat dan telah didirikan bangunan ruko diatas lahan tersebut.	Dalam proses	Desa air sebakul kota Bengkulu	Dalam proses mediasi
3.	Perkara Nomor 15/G/2021/P TUN tentang Pemilihan Kepala desa Jawi kabupaten Bengkulu Utara	Pihak yang kalah upaya banding dan sampai saat ini Bupati Kaur belum melantik calon yang menang.	Menunggu putusan banding	Desa Jawi kabupaten Kaur.	Dalam Proses
4.	Tanah UPTD Peternakan Kandang limun aset Pemerintah Provinsi Bengkulu.	Lahan UPT Peternakan seluas 58 Ha beberapa kafling telah diserobot masyarakat	Upaya mediasi antara masyarakat dengan pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu.	Desa kandang Limun Kecamatan Pematang gubernur Kota Bengkulu	Proses mediasi
5.	PT. FAMING LEPTO ABADI	Pihak PT. FAMING LEPTO ABADI akibat usaha tambang telah terjadi pengikisan lahan di pinggir sungai sekitar tambang pasir besi tersebut.	Upaya mediasi antara masyarakat dengan pihak Pemerintah Kabupaten Seluma.	Desa Pasar seluma Kabupaten Seluma	Proses mediasi oleh Pemerintah kabupaten seluma, kelengkapan administrasi untuk perpanjangan belum lengkap.

2. Pelayanan Fasilitas Masalah Sengketa Hukum

Pengaduan Hukum yang telah diterima dan sengketa hukum yang diikuti oleh Sub Bagian Non Litigasi dan HAM, Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pengaduan Hukum

- Perkara Nomor 15/G/2021/PTUN tentang Pemilihan Kepala desa Jawi kabupaten Kaur, dimana sampai saat ini Bupati kaur belum melantik sdr Yendra Haito pemenang pilkades dikarenakan Bupati kaur berpegang pada putusan PTUN Medan Nomor 30/B/2022.PT.T.MDN. dan juga pihak lawan masih yang kalah masih mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah agung, maka Bupati Kaur berpendapat dan menghargai untuk menunggu hasil amar putusan PK Yng diajukan tersebut sampai ada putusan tetap.
- Rapat audiensi sesuai Nomor surat Kanwil Kemnukumham Bengkulu Nomor W.8.HA.05.02-144 tanggal 12 April 2022, tentang Pelaksanaan Fasilitas Penanganan dugaan pelanggaran HAM di Wilayah berkeadilan surat pengaduan Ipda Jadil Abdullah, SH penyampi komunikasi tanggal 22 Maret 2022. Ibu Mertua Ibda Jadil Abdullah yang bernama ibu Nety Sukarty umur 60 tahun hampir 3 bula mendekam di Rutan Polres Kepahiang.

b. Konsultasi Hukum

Konsultasi Hukum yang telah ditangani oleh Sub Bagian Non Litigasi Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu diantaranya adalah sebagai berikut :

- Perihal Banding Administratif atas Keputusan Bupati Bengkulu Utara No.141.1/1198/dpmpd/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karang Anyar II Kecamatan Kota Arga Makmur , Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 28 Juli 2022.

surat yang kirimkan masih belum memenuhi syarat kelengkapan dimohon saudara dapat melampirkan Surat Jawaban Keberatan Administratif dari Bupati Kabupaten Bengkulu Utara maka permohonan Banding Administratif belum dapat di proses.

3. Penyampaian Laporan Aksi HAM secara Berkala

Subbag Non Litigasi juga menangani penyampaian laporan RANHAM secara berkala sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 53 tahun 2021 tentang Rencana Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, dimana Kabupaten kota diwajibkan untuk menyampauakan Laporan aksi HAM B04,B08 dan B12 tahun 2022, dan laporan Aksi HAM tersebut disampaikan ke kantor Staf Presiden RI melalui website kantor Staf Presiden (KSP) dimana Laporan tersebut dinilai oleh Tim verifikasi pusat dengan kriteria yang telah ditentukan sesuai Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021-2025.

- Gubernur Bengkulu telah mendapatkan penghargaan selama 5(lima) tahun berturut turut yang merupakan pe ntabina Kabupaten Kota Peduli HAM (KKP HAM).
- Sesuai Surat Direktorat Jenderal Hak asasi Manusia RI Nomor :HAM-UM.04-01-64 tanggal 30 November 2022 undangan sebagai penerima kabupaten Kota Peduli HAM menyatakan se-Indonesia hanya 98 Kabupaten/kota dan 10 Provinsi yang mendapatkan penghargaan, dan untuk provinsi Bengkulu yang mendapatkan penghargaan KKP HAM yaitu Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu. Sesuai tata cara penilaian gubernur selaku kepala daerah di undang atau diberikan penghargaan kalau masing masing Kabupaten Kota mendapatkan penghargaan lebih dari 60% sedangkan Provinsi Bengkulu tahun 2022 ini belum tercapai target dimaksud.

Beberapa hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya target pada tahun 2022 ini sebagai berikut:

- OPD dan Kabupaten/Kota kesulitan dalam mencapai target penilaian di karena beberapa format laporan meminta Instansi atau OPD dimaksud melaksanakan sosialisasi/bintek,terkait hak perempuan, hak anak,komunitas masyarakat adat dan penyandang disabilitas yang didukung dengan dokumen administrasi yang lengkap, sedangkan anggaran di OPD tersebut tidak tersedia, maka banyak OPD tidak mampu melaksanakanya.
- Disamping kurangnya kerjasama dari OPD terkait dalam penyampaian data laporan yang harus tepat waktu, juga disebabkan juga karena sering mutasi pejabat yang bertanggung jawab tentang Laporan Aksi HAM dan Kabupaten Kota Peduli HAM.

a. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- Sub bagian Non Litigasi dan HAM Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu dalam tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan;
- Dalam penanganan permasalahan hukum Non Litigasi berupa:
 - a. Penanganan Pengaduan Hukum;
 - b. Konsultasi Hukum;
 - c. Penanganan Unjuk Rasa.
- Penanganan permasalahan hukum berupa penanganan pengaduan masyarakat dan ASN pada tahun 2022 ada beberapa yang ditangani oleh sub bagian Non Litigasi dengan melakukan mediasi terhadap beberapa pengaduan walaupun belum sampai tuntas dalam penyelesaiannya;

- Dalam hal konsultasi hukum pada tahun 2022 ada beberapa yang sudah dilakukan oleh sub bagian Non Litigasi termasuk juga melakukan telaah hukum dan mediasi terhadap kasus Hukum yang sedang di alami oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Dalam hal penanganan unjuk rasa Sub Bagian Non Litigasi akan berkoordinasi dengan instansi terkait perihal penanganan demo dan akan melakukan mediasi terhadap tuntutan para pendemo dengan cara menuangkan tuntutan kedalam Berita Acara Rapat yang sudah disepakati selanjutnya instansi terkait yang akan menindaklanjuti.
- Pada tabel hasil pengawasan permasalahan hukum Non Litigasi di kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu dapat dilihat masih terdapat banyak kekurangan dalam hal monitoring dan pengawasan, dan terdapat beberapa kabupaten/kota yang belum dilakukan pengawasan dikarenakan terkendalanya biaya dan personil dalam melakukan pengawasan dimaksud;
- Belum terdapat pemahaman yang sama pemerintah kabupaten/kota bahwa pentingnya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dalam masyarakat sekaligus mendukung kemajuan dan kelancaran pembangunan.

2. Saran

- Dalam penanganan perkara Non Litigasi di Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu dukungan baik sarana dan prasarana dari Pemerintah Provinsi Bengkulu sehingga kegiatan ini bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Melaksanakan pengawasan ke Kabupaten/Kota dalam rangka pemetaan masalah yang terjadi di masyarakat dan juga pelaporan Aksi HAM Kabupaten/kota Peduli HAM oleh Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu;
- Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan pengawasan kegiatan penanganan permasalahan hukum Non Litigasi pada Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Biro Hukum mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar lebih membuka diri dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu apabila menemui kendala-kendala dalam menangani permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat serta permasalahan tentang pelaporan Aksi HAM.

Tabel

**PENILAIAN PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA
PEDULI HAM SEINDONESIA (KKP HAM) RPOVINSI BENGKULU
TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TAHUN 2022**

NO	TAHUN	KABUPATEN/KOTA	PENGHARGAAN KABUPATEN /KOTA PEDULI HAM SEINDONESIA (KKP HAM)
1.	2015	Lebong	Berhasil mendapatkan penghargaan KKP HAM diserahkan oleh Bapak Presiden RI (Joko Widodo) di Istana Negara Jakarta.
2.	2016	NIHIL	NIHIL
3.	2017	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Bengkulu - Rejang Lebong - Bengkulu selatan - Lebong - Bengkulu Utara - Muko-muko - Seluma - Bengkulu Tengah 	Berhasil mendapatkan penghargaan KKP HAM diserahkan oleh Bapak Presiden RI (Joko Widodo) di Kota Solo
4.	2018	<ul style="list-style-type: none"> - Kepahiang - Muko-muko - Bengkulu Tengah - Bengkulu Utara - Rejang Lebong - Kaur - Kota Bengkulu - Seluma - Lebong - Bengkulu selatan 	Berhasil mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) yang diserahkan oleh Bapak Wakil Presiden RI (Jusuf Kalla) bertempat di Jakarta
5.	2019	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Bengkulu - Bengkulu selatan - Bengkulu Utara - Rejang Lebong - Kaur - Seluma - Kepahiang - Muko-muko - Benteng - Lebong 	Berhasil mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) yang diserahkan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Prof. Yasonna Laoly, S. H, M. Sci. Ph. D
6.	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Bengkulu Tengah - Bengkulu Utara - Kaur - Kepahiang - Lebong - Muko-muko - Rejang Lebong - Seluma 	Berhasil mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) yang diserahkan oleh Wakil Gubernur Bengkulu melalui Zoom Meeting dilaksanakan dikarenakan Covid-19
7.	2021	-	Tidak ada Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) dikarenakan adanya wabah COVID-19
8.	2022	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Bengkulu - Rejang Lebong 	Berhasil mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bpk Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin dan Bpk Prof. Yasonna Laoly, S.H, M. Sci. Ph. D

Capaian kinerja pelaporan Aksi Ham dalam kurun waktu 5 (lima tahun) yaitu dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, berhasil secara maksimal mencapai target 100%. Pelaporan Aksi HAM berhasil memperoleh penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM secara berturut- turut diperoleh oleh Bapak Gubernur Bengkulu sebagai pembina dan pembangun Kabupaten/Kota Peduli HAM sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.

REKOMENDASI DAN SARAN

Langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penyelesaian perkara litigasi, permasalahan hukum non litigasi dan meningkatnya penghormatan, perlindungan, pemahaman, penegakan dan pemajuan HAM Provinsi Bengkulu:

- 1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.
- 2. Mengikuti BinteK dan Sosialisasi.
- 3. Penambahan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas.
- 4. Pengiriman laporan HAM ke kantor staf Presiden yang tepat waktu.
- 5. Adanya sinergi antara perangkat daerah untuk pelaporan Aksi HAM.

SASARAN 3. MENINGKATNYA INFORMASI DIBIDANG HUKUM

No	URAIAN	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Jumlah Produk Hukum Daerah yang didokumentasikan	2021	- 7 Perda - 44 Pergub - 520 Kep Gub - 17 Naskah Hukum	- 7 Perda - 44 Pergub - 520 Kep Gub - 17 Naskah Hukum	100%
		2022	- 7 Perda - 44 Pergub - 520 Kep Gub - 17 Naskah Hukum	- 7 Perda - 44 Pergub - 520 Kep Gub - 17 Naskah Hukum	100%

Sumber : Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang didokumentasikan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu adalah :
 - Peraturan Daerah Tahun 2022 : 7
 - Peraturan gubernur Tahun 2022 : 44
 - Keputusan Gubernur Tahun 2022 : 520
 - Naskah Hukum Lainnya Tahun 2022 : 17

REKOMENDASI DAN SARAN

- 1. Peningkatan sarana pada Website JDIH.
- 2. BinteK dan Sosialisasi bagi Pegawai Negeri Sipil/ Admin JDIH.

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU


HENDRI DONAN, S.H, M. H
Pembina TK.I
NIP. 19750825 200502 1 005